



Eksistensi Perempuan Madura Dalam Pembangunan Daerah Berbasis Berkelanjutan (Sdgs) Di Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan UMKM

Moh Imam Ibnuallah¹, Nur Hayati^{2*}, Siti Musyarofah³, M Djasuli⁴

^{1,2}Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia
nur.hayati@trunojoyo.ac.id*,
imamibnullah@gmail.com¹⁾

ARTICLE INFO

Article history:
Received 31 Oktober
2023
Received in Revised 30
November 2023
Accepted 30 April 2024

Keyword's : *SDGs, UMKM, PAD, Peran Perempuan, Gender Equality*

ABSTRACT

This study aims to see how the involvement and role of Madurese women in sustainable regional development (SDGs) in the tourism sector of Sumenep Regency, namely Lombang Beach, Slopeng Beach and the Keraton Museum on the growth of MSMEs and PAD. Where many studies show that there is gender inequality that occurs in various sectors including the tourism sector which is actually contrary to the fifth goal of the SDGs, namely gender equality. This study uses a qualitative method with a case study approach and uses interviews and observations as data collection techniques. This study identifies the role or involvement of Madurese women divided into 4, namely 1) women at the management level, 2) women at the service/facility level 3) women at the promotion level 4) women at the MSME business unit manager level.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana keterlibatan dan peran perempuan Madura dalam pembangunan daerah berbasis berkelanjutan (SDGs) di sektor pariwisata Kabupaten Sumenep yaitu pantai lombang, pantai slopeng dan museum keraton terhadap pertumbuhan UMKM dan PAD. Dimana banyak penelitian menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender yang terjadi diberbagai sektor termasuk sektor pariwisata yang justru bertolak belakang dengan tujuan ke lima SDGs yaitu gender equality. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini mengidentifikasi peran atau keterlibatan perempuan Madura terbagi menjadi 4 yaitu 1) perempuan dalam level manajemen, 2) perempuan dalam level pelayanan/fasilitas 3) perempuan dalam level promosi 4) perempuan dalam level pengelola unit bisnis UMKM

AKUISISI : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6285259726661; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: nur.hayati@trunojoyo.ac.id

Peer review under responsibility of *Akuisisi : Accounting Journal*. [2477-2984](https://doi.org/10.24217).

<http://dx.doi.org/10.24217>

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan sebutan formal Sustainable Development Goals (SDGs), merupakan program pembangunan global yang disepakati oleh seluruh negara, khususnya negara yang berada di bawah keanggotaan PBB termasuk Indonesia didalamnya. Secara sederhana makna konsep berkelanjutan dapat diartikan sebagai pendekatan pembangunan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik untuk masa sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang (Ariani & Juraida, 2019). SDGs bertujuan untuk menciptakan realitas kehidupan global yang bukan hanya lebih maju, berkembang, dan transformatif. Namun lebih dari itu, SDGs membawa semangat besar dalam mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang kesemuanya bermuara pada tercapainya kesejahteraan hidup dengan menciptakan iklim kehidupan masyarakat dunia yang mengarah pada terjaminnya hak asasi manusia, serta kesetaraan (Hannan, 2018). Salah satu pembangunan berkelanjutan yang saat ini digalakkan oleh pemerintah Indonesia adalah pembangunan di bidang pariwisata. Pariwisata adalah sektor yang sangat strategis yang dapat menimbulkan efek berganda (multiplier effect) baik secara langsung maupun tidak langsung (Dewi & Adi, 2021). Diantaranya mendorong pertumbuhan UMKM lokal, menyerap lapangan kerja serta meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indonesia sendiri dikenal sebagai sebuah negara kaya akan keanekaragaman budaya yang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Letak geografis Indonesia memungkinkan untuk mengembangkan sektor pariwisata, Komponen penting dalam pariwisata Indonesia adalah kekayaan alam dan budaya.

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Sumenep yang merupakan kabupaten ujung timur Madura, alasan peneliti memilih Sumenep dibandingkan dengan kabupaten lain di Madura dikarenakan Sumenep pada tahun 2020 meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA berdasarkan website sumenepkab.go.id (Pekab Sumenep, 2021). Perkembangan wisata di pulau Madura tentu tidak terlepas dari keterlibatan dan peran aktif dari masyarakat sekitar objek wisata. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung aktifitas pariwisata karena masyarakat merupakan orang-orang yang paling mengenali kondisi wilayahnya sendiri sehingga mereka merupakan sumber informasi yang akurat untuk memperoleh informasi mengenai potensi, kebutuhan, dan kondisi (Aprilia & Suryaningsih, 2022). Selain itu keterlibatan masyarakat akan menumbuhkan rasa saling memiliki karena mereka dilibatkan dalam proses pengembangan wisata. Namun pada kenyataannya proses perkembangan objek wisata hanya terfokus pada golongan laki-laki padahal keterlibatan perempuan sama pentingnya dengan keterlibatan laki-laki karena perempuan juga merupakan bagian dari masyarakat. Menurut pendapat (Ariani & Juraida, 2019) perempuan adalah faktor yang sangat

penting seperti ikut serta dalam pengelolaan objek wisata, ikut serta dalam pengambilan keputusan untuk membuat suatu regulasi, ikut serta dalam mengelola dan melestarikan lingkungan.

Dalam konteks pembangunan, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga erat kaitannya dengan perbaikan kualitas generasi penerus bangsa, mengingat seorang ibu yang dibekali dengan ilmu pengetahuan merupakan kunci dari pembangunan yang dimulai dari kehidupan keluarga (Dewi Y. S., 2021). Hal ini didukung dengan fakta ilmiah bahwa “gen kecerdasan” diwariskan oleh seorang ibu. Bentuk peran perempuan dalam pembangunan yaitu dengan partisipasi aktif di bidang ekonomi, politik maupun sosial. Salah satu contoh peran perempuan dalam sektor ekonomi adalah perempuan menjadi tulang punggung dalam perkembangan ekonomi kreatif dan pariwisata hal ini didukung dengan fakta bahwa sepanjang tahun 2021 sekitar 64,5% pelaku UMKM adalah perempuan sedangkan berdasarkan data dari UNWTO pada tahun 2019 tercatat sekitar 55,7% tenaga kerja perempuan. Terkhusus dalam sektor pariwisata menurut (Dewi & Adi, 2021) perempuan bisa menjadi aktor penting karena di sektor tersebut menuntut adanya sikap ramah tamah yang dimiliki perempuan secara alamiah yang menjadi kunci supaya wisatawan datang kembali.

Besarnya perempuan di atas membuktikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi aktif dan memainkan peran penting terutama dalam pengembangan pariwisata. Partisipasi perempuan penting untuk ditingkatkan guna mencapai target terjaminnya partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi kaum perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan baik dalam kehidupan politik, ekonomi, maupun masyarakat. Penelitian ini mereplikasi dan mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ariani & Juraida, 2019) tentang “Eksistensi Perempuan Suku Sasak dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Bidang Ekowisata Desa Sembalun Lawang” menyebutkan bahwa eksistensi keterlibatan perempuan suku sasak disamping berdampak pada keberlangsungan lingkungan juga bisa mencapai kesetaraan gender dan membuat perempuan lebih berdaya dan berdampak pada peningkatan ekonomi mereka. Namun penelitian ini menggunakan UMKM sebagai pengembangan dari penelitian tersebut.

Studi mengenai keterlibatan perempuan dalam sektor industri pariwisata merupakan suatu kajian yang melihat keterlibatan perempuan dalam mengelola pembangunan berbasis berkelanjutan (SDGs), selama ini perempuan sering diabaikan pendapatnya meskipun sebenarnya perempuanlah yang lebih dekat dan memahami lingkungan melalui aktivitas mereka sehari-hari. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Eksistensi Perempuan Madura Dalam Pembangunan Daerah Berbasis Berkelanjutan (Sdgs) Di Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Umkm, Dan Pendapatan Asli Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus menurut Cresswell dalam (Sugiono, 2013) mengungkapkan bahwa metode studi kasus merupakan metode yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami suatu kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan cara mengumpulkan berbagai informasi kemudian mengolah informasi tersebut hingga sampai pada solusi untuk memecahkan masalah yang ada. Objek dalam penelitian ini adalah objek wisata yang dikelola langsung oleh Pemkab Sumenep yaitu Pantai Lombang, Pantai Slopeng dan Museum Keraton.

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini merupakan data kualitatif berupa hasil wawancara dan observasi. Sementara informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik purposive sampling yang terdiri dari berbagai instansi yaitu

Table 1. Tabel Informan Penelitian

No	Instansi	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Bappeda	Helmi	Kepala Litbang	1
2	Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Imam Bukhari	Kepala Bidang Pariwisata	1
		Agus Sugiyanto	Kepala UPTD Destinasi	1
		Rhiyanta C.Y	Admin dan Pemandu Museum keraton	1
3	Dinas Sosial	Bambang Ismahyudi	Staff PA	1
4	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	Syaiful Anwar	Kasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	1
		Jefri Mahendra	Tenaga Admin	1
	Total			7

Sumber: diolah peneliti, 2022

Dalam hal pemilihan sumber informan peneliti menyesuaikan dengan ranah pada masing-masing dinas yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti seperti disbudporapar berkenaan dengan pariwisata, Bappeda dengan SDGs, Dinas Sosial berkenaan dengan perempuan, dan disperindag berkenaan dengan UMKM. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model (Mathew & Hubberman, 1992) yang terdiri dari 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Perempuan Dalam Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata dapat diartikan sebuah usaha-usaha yang diupayakan oleh pemerintah atau pihak terkait dalam rangka menggali potensi di bidang pariwisata yang ada di daerah setempat guna menambah pendapatan bagi pemerintah negara maupun daerah (Yuanita & Guatama, 2020) Makna pengembangan tidak hanya terbatas pada pembangunan yang bersifat

fisik melainkan pembangunan juga pada masyarakat atau SDM. Pembangunan dan pengembangan di sektor pariwisata tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat sekitar dikarenakan masyarakat sekitar adalah orang yang paling tau dengan lingkungannya dibanding dengan orang luar. oleh sebab itu pengembangan masyarakat menjadi penting terutama kaum perempuannya dalam hal upaya penyetaraan gender dan memberi kesempatan yang sama bagi perempuan, karena sektor pariwisata merupakan perpanjangan tangan dari sektor rumah tangga.

Namun pembangunan di sektor SDM atau masyarakat terutama kaum perempuan lebih sulit jika dibandingkan dengan pembangunan yang bersifat fisik oleh sebab itu upaya pemberdayaan perempuan dengan melakukan upaya sosialisasi terhadap pemahaman kesetaraan gender bagi masyarakat tidak cukup hanya dengan melakukan satu kali sosialisasi namun harus dilakukan secara kontinyu atau berkelanjutan. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut dapat meningkatkan peran dan keterlibatan perempuan. Sementara itu peran dan keterlibatan perempuan pada objek wisata tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

a. Perempuan Dalam Level Manajemen

Peran perempuan dapat dilihat pada level pengambil keputusan atau dalam level pembuat kebijakan yaitu Dinas Kebudayaan Pemuda olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar). Disbudporapar memiliki 4 bidang yaitu Bidang Pariwisata, Bidang Kebudayaan, Bidang Pemuda dan Olahraga dan Bidang Pemasaran yang masing masing dibantu oleh sub bagian. Bidang Pariwisata dan Bidang Pemasaran merupakan Bidang yang berhubungan langsung dengan sektor pariwisata. Di kedua bidang tersebut terdapat 3 perempuan yaitu sebagai staf pelaksana sumber daya pariwisata serta kabid pemasaran dan kasi kerjasama dan investasi pariwisata.

Keterlibatan perempuan di level pembuat kebijakan terutama dinas pariwisata yang mengelola langsung 3 destinasi wisata menjadi sangat penting karena keberadaan kaum perempuan disana dapat berdampak pada regulasi-regulasi yang dibuat tidak ada unsur diskriminasi, sehingga keberadaan mereka di level pembuat kebijakan dapat mendorong perempuan lain untuk lebih berdaya dan dapat berpartisipasi lebih. Selain itu partisipasi perempuan di level manajemen atau pemangku kebijakan dapat meminimalisir terjadinya subordinasi dan marginalisasi bagi perempuan.

b. Perempuan Dalam Level Fasilitas/Pelayanan

Peran perempuan juga dapat dilihat dari sisi fasilitas atau pelayanan yaitu kebersihan kamar mandi atau area pantai. Menjaga kebersihan lingkungan destinasi wisata merupakan salah satu upaya membuat para wisatawan memiliki kesan yang baik dan kerasan selama menikmati keindahan objek wisata. Hal ini juga menjadi faktor penting agar wisatawan dapat berkunjung kembali di lain hari. Di pantai Lombang dan Slopeng perempuan juga dilibatkan dalam menjaga kebersihan area pantai. Di pantai lombang terdapat 1 orang perempuan sementara di pantai slopeng terdapat 2 orang

perempuan sebagai tenaga kebersihan. Peran perempuan di level ini masih cukup rendah secara kuantitas.

c. Perempuan Dalam Level Promosi

Faktor penting dalam kemajuan pariwisata adalah promosi atau pemasaran. Karena promosi membantu dalam penyebaran seputar informasi mengenai destinasi wisata di suatu daerah yang nantinya akan berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan. Peran perempuan dalam level ini harusnya menjadi garda terdepan dalam hal promosi pariwisata mengingat daya tarik ada pada diri perempuan. Peran perempuan dalam mempromosikan destinasi wisata dapat menjadi pemicu kedatangan wisatawan untuk berkunjung. Peran yang mereka bisa meliputi menjadi duta wisata Kacong/Cebbhing atau menjadi talent dalam video pendek.

d. Perempuan Dalam Level Pengelola Unit Bisnis dan UMKM

Salah yang tidak bisa dipisahkan di sektor pariwisata adalah unit bisnis atau UMKM. Keberadaan UMKM di objek wisata guna memenuhi kebutuhan wisatawan baik berupa makanan, oleh-oleh sampai dengan souvenir atau cindramata, dengan kata lain keberadaan UMKM merupakan faktor penting dalam mendukung aktivitas kepariwisataan. Sektor UMKM menjadi sektor yang membuka kesempatan yang sangat luas bagi kaum perempuan. Mayoritas penjual makanan, PKL, souvenir dan lain-lain yang ada di destinasi wisata rata-rata merupakan kaum ibu-ibu hal ini memang dikarenakan sektor UMKM merupakan sektor perpanjangan rumah tangga.

Tabel 2. Tabel Jumlah UMKM Objek Wisata

No	Objek Wisata	Jumlah
1	Museum Keraton	30
2	Pantai Lombang	32
3	Pantai Slopeng	64
	Total	126

Sumber: Ditudporapar, Disperindag, observasi, 2022

Dari tabel tersebut peneliti belum bisa mengidentifikasi UMKM yang dikelola oleh perempuan namun berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan mengatakan bahwa perempuan banyak terlibat di sektor UMKM maka jika diasumsikan dalam satu UMKM minimal ada satu perempuan maka ada 126 perempuan yang terlibat dalam sektor pelaku UMKM yang ada di 3 objek wisata tersebut. Dalam hal ini keberadaan UMKM turut membantu kaum perempuan untuk dapat berkontribusi dan mengaktualisasikan dirinya dalam sektor pariwisata.

Konsep Gender and Development (Gad), Women and Development (WaD) dan Women in Development

Kesetaraan gender sudah menjadi salah satu target bahkan sejak MDGs hingga sekarang SDGs. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan target 4 ke tiga dari delapan

target MDGs (Kabeer, 2010). Bahasa “Kesetaraan Gender” dan “Pemberdayaan Perempuan dibawa oleh perempuan di tahun 1980 dan 1990 sebagai sebuah cara mendapatkan hak perempuan di agenda pengembangan internasional (Cornwall & Rivas, 2015). Oleh karena itu (Mosse, 1996) mengemukakan program pendekatan pemberdayaan perempuan dalam mengatasi berbagai masalah gender 17 diantaranya pendekatan Women In Development (WID), kemudian Women And Development (WAD), dan sampai pada pendekatan Gender And Development (GAD)

Women In Development

WiD (Women in Development) adalah pendekatan pembangunan yang mendorong emansipasi perempuan untuk lebih berperan dalam berbagai bidang kehidupan terutama memastikan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2008). WiD berpandangan bahwa Masalah perempuan dapat teratasi melalui perbaikan pendidikan mereka, melalui pendidikan yang bermutu perempuan diharapkan dapat mengejar ketertinggalannya dari laki-laki dan diharapkan dapat meningkatkan posisi mereka pada sektor-sektor produktif dalam tenaga kerja.

Menurut (Riniwati, Fitriawati, & Susilo, 2019) pendekatan WiD pada dasarnya berpijak pada dua sasaran yaitu pertama, menitikberatkan pada pengadaan program yang dapat mengurangi atau menghapuskan diskriminasi yang kerap dialami oleh perempuan. Penerapan pelaksanaan program pada pendekatan WiD yaitu yang dapat mendorong perempuan memperoleh penghasilan dan memasuki sektor publik. Kedua, prinsip egalitarian yaitu kepercayaan bahwa semua orang memiliki posisi yang setara.

Women And Development

WaD (Women and Development), kata penghubung “dan” menunjukkan kesetaraan antara kata “perempuan” dan “pembangunan”. Jika dalam WiD berfokus pada terintegrasi nya perempuan dalam pembangunan maka WaD fokus pada pola relasi antara perempuan dan pembangunan (Rathgeber, 1989) WaD tidak membahas posisi laki-laki dan perempuan karena pendekatan ini sudah mengakui bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan, kesempatan dan peran yang setara (Kabeer, 2010).

Implementasi WaD berfokus pada pengembangan kegiatan peningkatan pendapatan tanpa memperhatikan unsur waktu yang digunakan oleh perempuan (Dewi Y. S., 2021) Oleh sebab itu tolak ukur implementasinya adalah ukuran produktivitas perempuan baik secara kesempatan maupun kemampuan yang dimiliki. WiD dan WaD memiliki beberapa kesamaan salah satunya adalah berkaitan dengan kerangka ekonomi dan politik negara. Namun menurut penelitian dari (Kurniawati, 2019) terdapat kesalahan konsep dari WaD yaitu meninggalkan unsur laki-laki dalam pembangunan sehingga hanya terfokus pada perempuan. Oleh sebab itu perlu ada perbaikan dari

konsep WaD sehingga benar-benar terjadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

Gender And Development

Pendekatan (GaD) melihat perempuan sebagai agen perubahan sehingga mendorong mereka untuk bersikap lebih pro aktif dalam kehidupan sosial (Prabosiwi, 2015). Pendekatan ini bertujuan mencari penyebab perempuan menjadi kelompok kelas dua dilingkungan masyarakat. Tujuan akhir GAD adalah mencapai pergeseran hubungan kekuasaan yang akan memberikan perempuan otonomi lebih besar. Menurut pendapat (Handayani dan Sugiarti, 2008) yang menyatakan bahwa GAD tidak akan terlaksana apabila negara menempatkan perempuan pada posisi yang inferior dan subordinatif, negara harus hadir dalam bentuk dukungan pada politik nasional dan menempatkan perempuan pada posisi yang sejajar dengan laki laki. Oleh sebab itu GaD melihat perempuan sebagai subjek pembangunan bukan hanya sebatas objek pembangunan atau sebagai penerima bantuan pembangunan yang pasif. Maka dari itu peran perempuan lebih kepada inisiator dari sebuah pembangunan, bukan sekedar penerima penyuluhan-penyuluhan yang bersifat top down. Pendekatan semacam ini hanya dapat dilakukan apabila kelompok perempuan melakukan pembentukan solidaritas yang terorganisir

Maka jika mengacu pada kondisi yang terjadi di sektor pariwisata di kabupaten Sumenep, paradigma pembangunan mengacu pada pola pendekatan Women in Development. Ciri utama nya adalah bahwa dalam proses aktivitas yang ada di kabupaten Sumenep perempuan memang sudah memiliki peran didalamnya namun peran tersebut masih rendah secara kuantitas dan rendah secara kualitas. Peran perempuan masih terbatas pada ranah-ranah pekerja seperti tenaga kebersihan, penjaga loket, dan Pedagang Kaki lima dan UMKM. Sementara pada level pemangku kebijakan memang sudah ada keterwakilan di posisi yang strategis seperti Kabid Pemasaran namun masih tergolong rendah, kualitas keterwakilan perempuan menjadi sangat penting terutama pada level seperti pengelola, investor, inisiator dan lain-lain agar memenuhi kebutuhan strategis gender seperti mengakomodir aspirasi kaum perempuan.

Pada kasus yang terjadi dalam sektor pariwisata sumenep perempuan masih diposisikan sebagai objek pembangunan dalam artian menjadi target pemberian bantuan program-program hasil kebijakan pemerintah seperti pengadaan pelatihan-pelatihan bagi kaum perempuan. Selain itu peran perempuan masih berada di posisi yang termarginal (Petugas loket, Tenaga kebersihan dll) sementara itu perempuan yang mempunyai akses dalam pengambilan keputusan seperti halnya investor, inisiator dan pemangku kebijakan jumlahnya masih terbatas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa eksistensi perempuan dapat diklasifikasikan dalam 4 level diantaranya level pemangku kebijakan yaitu disbudporapar selaku pengelola objek wisata, level fasilitas dan pelayanan seperti penarik retribusi atau tenaga kebersihan, level pengelola unit bisnis dan UMKM dan yang terakhir level promosi dan pemasaran. Dalam identifikasi peneliti peran perempuan dalam pengembangan 3 objek wisata plat merah kabupaten Sumenep perempuan dalam level pengelola unit bisnis UMKM merupakan yang paling signifikan. Sementara paradigma pembangunan gender menurut (Mosse, 1996) yang terjadi di objek wisata plat merah kabupaten Sumenep masih berparadigma WID (*Women in Development*).

Peluang riset yang dapat dilakukan pada penelitian ini adalah dengan melakukan studi perbandingan eksistensi perempuan sektor wisata non pemerintah, swasta ataupun milik bersama serta menggunakan informan perempuan guna mendapat sudut pandang argumen antara laki-laki dan perempuan, hal ini merupakan keterbatasan dalam penelitian ini disebabkan kondisi lapangan dan instansi yang menunjuk langsung perwakilan informan masing-masing dinas yang membuat peneliti tidak bisa memiliki wewenang dalam menentukan informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, S. A., & Suryaningsih, S. A. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Halal serta Dampaknya terhadap Perekonomian (Studi Kasus : Kawasan Wisata Religi Makam Gus Dur). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 1555-1570.
- Ariani, D., & Juraida, I. (2019). Eksistensi Perempuan Suku Sasak dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Bidang Ekowisata Desa Sembalun Lawang (Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan SDGs). *Community Pengawas Dinamika Sosial*, 106-115.
- Cornwall, A., & Rivas, A.-M. (2015). From “Gender Equality and Women’s Empowerment” to Global Justice: Reclaiming a Transformative Agenda for Gender and Development. *Published online: 24 Mar 2015 Volume 26, 2015-Issue 2*, 396-415.
- Dewi, D. N., & Adi, S. W. (2021). Analisis Sektor Pariwisata Terhadap Pedapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2018). *Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis*, 702-711.
- Dewi, Y. S. (2021). Peran Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan Woman in Sustainable Development. *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 61-64.
- Hannan, A. (2018). Perempuan Madura Dan Pembangunan Daerah Berbasis Berkelanjutan (SDGs) Analisis SWOT Eksistensi Perempuan Madura Menuju Pembangunan Berbasis Berkelanjutan (SDGs). *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 19-41.

- Kabeer, N. (2010). Gender equality and women's empowerment: a critical analysis of the third Millennium Development Goal1. 13-24.
- Kurniawati, N. (2019). Partisipasi Perempuan Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mjokorto Kota Kediri Jawa Timur. *Perpustakaan Universitas Airlangga*.
- Mathew, M. B., & Hubberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mosse. (1996). Rescuing gender from the poverty trap. *World Development, Volume 24, Issue3*, Pages 489-504.
- Pemkab Sumenep. (2021, Oktober 14). *Raih APE, Pemkab Sumenep Komitmen Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. Retrieved November 9, 2022, from sumenepkab: <https://sumenepkab.go.id/berita/baca/raaih-ape-pemkab-sumenep-somitmen-mewujudkan-kesetaraan-dan-keadilan-gender>
- Prabosiwi, R. (2015). Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Natapraja Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 41-56.
- Rathgeber, E. M. (1989). WID, WAD, GAD: Trends in Research and Practice . *International Development Research Centre* , 1-24.
- Riniwat, H., Fitriawati, R., & Susilo, E. (2019). Gender Dan Pembangunan : Studi Kasus Pada Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Prbolinggo. *Peneliti Pada Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)-UB*.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Indonesia: Alfabeta.
- Yuanita, R. A., & Guatama, A. T. (2020). Dinamika Peran Perempuan Dalam Pengembangan Pariwisata di Daerah Pesisir Kabupaten Rembag (Studi Deskriptif Objek Wisata Pantai Karang Jahe Desa PunjulharjoKecamatan Rembang, Kabupaten Rembang). *Journal of Development and Social Change*, 52-61.